

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Inklusi Keuangan

2.1.1.1 Pengertian Inklusi Keuangan

Istilah inklusi keuangan merupakan istilah yang populer dikalangan masyarakat sebagai kontribusi keuangan untuk pembangunan berkelanjutan, akan tetapi tidak banyak yang paham akan istilah ini. Padahal dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari sudah melakukan banyak kegiatan yang merupakan bagian dari inklusi keuangan. Menurut Durai & Stella (2019:122) inklusi keuangan dapat didefinisikan sebagai “Proses memastikan akses layanan keuangan dan kredit yang dapat diakses oleh golongan lemah dan berpenghasilan rendah dengan biaya yang terjangkau”. Menurut World Bank (2014:1) “Inklusi keuangan merupakan kemampuan individu atau kelompok yang dapat memiliki akses terhadap produk dan layanan keuangan”. Layanan yang dimaksud tersebut formal yang bermanfaat dan terjangkau, serta mampu memenuhi kebutuhan mereka, seperti transaksi, pembayaran, tabungan, kredit dan asuransi secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Gerdeva & Rhyne (2011:6) mendefinisikan “Inklusi keuangan merupakan kondisi pada saat seluruh masyarakat memiliki akses produk dan layanan jasa keuangan” Sementara itu, menurut Wahid (2014:54) *financial inclusion* merupakan “rencana pembiayaan inklusif yang tujuan utamanya memberikan berbagai layanan keuangan kepada masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah”.

Berdasarkan situs resmi Bank Indonesia definisi inklusi keuangan mengacu pada tiga teori lembaga yaitu *The Consultative Group to Assist the Poor-Global Partnership for Financial Inclusion* (CGAP-GPFI), *Financial Action Task Force* (FATF) dan *Reserve Bank of India*. CGAP-GPFI mendefinisikan inklusi keuangan yaitu suatu kondisi di mana semua orang dewasa usia kerja memiliki akses efektif terhadap layanan kredit, tabungan, pembayaran, dan asuransi dari penyedia layanan formal. Akses yang efektif melibatkan pemberian layanan yang

nyaman dan bertanggung jawab dengan biaya yang terjangkau bagi masyarakat dan berkelanjutan bagi penyedia dengan hasil bahwa masyarakat yang dikecualikan secara finansial menggunakan layanan keuangan formal daripada opsi informal. Lembaga CGAP-GPFI (2011:1) mendefinisikan bahwa:

“State in which all working age adults have effective access to credit, savings, payments, and insurance from formal service providers. Effective access involves convenient and responsible service delivery, at a cost affordable to the customer and sustainable for the provider, with the result that financially excluded customers use formal financial services rather than existing informal options”.

Kemudian inklusi keuangan menurut FATF (*The Financial Action Task Force*, 2011:12) *“Financial inclusion involves providing access to an adequate range of safe, convenient and affordable financial services to disadvantaged and other vulnerable groups, including low income, rural and undocumented persons, who have been underserved or excluded from the formal financial sector”* yaitu tersedianya akses ke berbagai layanan keuangan dengan aman, nyaman dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sedangkan menurut *Reserve Bank of India* (RBI, 2016:1) didefinisikan: *“Process of ensuring access to appropriate financial products and services needed by all sections of the society in general and vulnerable groups such as weaker sections and low-income groups in particular, at an affordable cost in a fair and transparent manner by regulated, mainstream institutional players”* yaitu proses memastikan akses ke produk dan layanan keuangan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh semua lapisan masyarakat khususnya kelompok berpenghasilan rendah dengan biaya yang terjangkau secara adil dan transparan oleh pelaku kelembagaan.

Dari rujukan tiga teori tersebut Bank Indonesia (2014:4) mendefinisikan *“Keuangan inklusif (financial inclusion) sebagai seluruh upaya yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan”*. Indikator yang dapat dijadikan ukuran dari keuangan yang inklusif sebuah negara adalah ketersediaan atau akses untuk mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal dalam hal keterjangkauan fisik dan harga, penggunaan untuk mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan (antara lain keteraturan,

frekuensi, dan lama penggunaan), kualitas untuk mengukur apakah atribut produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutuhan pelanggan, dan kesejahteraan untuk mengukur dampak layanan keuangan terhadap tingkat kehidupan pengguna jasa. Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan (2016:3) mendefinisikan “Inklusi keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. Kesejahteraan masyarakat tersebut meliputi berbagai kelompok termasuk masyarakat menengah ke bawah.

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa inklusi keuangan ketersediaan akses layanan keuangan ke berbagai lembaga, produk maupun layanan keuangan yang dapat dijangkau dengan mudah, nyaman dan aman oleh seluruh lapisan masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat guna untuk mencapai kesejahteraan. Kesimpulan yang diambil dari beberapa pengertian tersebut mendekati pendapat yang disampaikan World Bank dan OJK.

2.1.1.2 Tujuan Inklusi Keuangan

Dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi konsumen atau masyarakat berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 76/POJK.07/2016 pasal 12 tujuan inklusi keuangan meliputi:

- a. Meningkatnya akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan pelaku usaha jasa keuangan.
- b. Meningkatnya penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan oleh pelaku usaha jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
- c. Meningkatnya penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
- d. Meningkatnya kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

Tujuan inklusi keuangan tersebut dapat tercapai dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif “keuangan inklusif merupakan komponen penting dalam proses inklusi sosial dan ekonomi yang berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas sistem keuangan, mendukung program penanggulangan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan

antar individu dan antar daerah dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat”. Untuk mencapai Strategi Nasional Keuangan Inklusif terdapat kebijakan yang mencakup pilar dan fondasi SNKI yang didukung koordinasi antar kementerian/lembaga atau terkait serta dilengkapi dengan aksi keuangan inklusif.

2.1.1.3 Pilar dan Fondasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif

Untuk mendukung terciptanya sistem keuangan yang inklusif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat diperlukan sistem keuangan yang inklusif, stabil dan dalam. Berikut lima pilar dan fondasi dari Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Perpres SNKI, 2020:10-12):

- a. **Pilar Edukasi Keuangan**
Bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai lembaga keuangan formal. Pilar edukasi keuangan meliputi aspek fitur, manfaat dan risiko, biaya, hak dan kewajiban serta untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam perencanaan dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan.
- b. **Pilar Hak Properti Masyarakat**
Hak properti masyarakat bertujuan untuk meningkatkan akses kredit/pembiayaan masyarakat kepada lembaga keuangan formal yang dapat dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat.
- c. **Pilar Produk, Intermediasi dan Saluran Distribusi**
Pilar ini bertujuan untuk memperluas akses dan jangkauan masyarakat berbagai kelompok dalam mendapatkan layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan.
- d. **Pilar Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah**
Layanan keuangan pada sektor pemerintah bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan transparansi pelayanan publik dalam penyaluran dana pemerintah secara non tunai.
- e. **Pilar Perlindungan Konsumen**
Perlindungan konsumen bertujuan untuk menyediakan rasa aman kepada masyarakat dalam melakukan layanan keuangan serta memiliki prinsip transparansi, perlakuan adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data dan informasi konsumen secara sederhana, cepat dan dengan biaya terjangkau.

Kelima pilar di atas dalam mewujudkan keuangan yang inklusif didukung dengan tiga fondasi berikut:

- a. **Kebijakan dan regulasi yang kondusif**
Kebijakan dan regulasi pemerintah serta otoritas atau regulator yang kondusif berperan dalam pemberian dukungan kebijakan dan regulasi untuk keuangan inklusif.
- b. **Teknologi informasi dan komunikasi, teknologi digital serta infrastruktur keuangan yang mendukung**

Peran teknologi sangat penting untuk memberikan dukungan dan meminimalkan informasi asimetris yang menjadi hambatan dan dukungan infrastruktur dalam mengakses layanan keuangan.

- c. Organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif
Keberagaman pelaku keuangan inklusif memerlukan koordinasi dan mekanisme pelaksanaan SNKI secara bersama dan terpadu untuk mendukung pencapaian keuangan inklusif di Indonesia.

Dalam mewujudkan keuangan inklusif maka pilar dan strategi harus dapat dioptimalkan sehingga keuangan inklusif memiliki fondasi yang kuat dan dapat mencapai inklusi keuangan yang stabil dan terus meningkat seiring dengan perkembangan perekonomian.

2.1.1.4 Indikator Tingkat Inklusi Keuangan

Dalam Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 (Perpres SNKI, 2020:12) indikator keuangan inklusif dikelompokkan menjadi tiga jenis dimensi berikut:

- a. Jangkauan, yaitu kemampuan untuk menggunakan layanan keuangan formal dari aspek keterjangkauan fisik dan biaya.
- b. Penggunaan, yaitu penggunaan aktual atas layanan dan produk keuangan.
- c. Kualitas, yaitu tingkat pemenuhan kebutuhan atas produk dan layanan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sedangkan menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* atau OECD (2016:90) terdapat lima indikator. Indikator tersebut yang akan penulis gunakan dalam mengukur tingkat inklusi keuangan karena indikator yang dijadikan kuesioner tersebut sudah digunakan di beberapa negara dengan keadaan dan karakteristik responden yang berbeda. Pertanyaan dirancang dengan fokus pada:

- a. Tabungan/Investasi
Tabungan/Investasi merupakan bagian dari *product holding* yang mana gunanya untuk mengidentifikasi produk keuangan yang saat ini dimiliki oleh responden. Indikator ini dapat mengeksplorasi apakah konsumen setidaknya sadar akan produk keuangan yang tersedia secara nasional, apakah mereka membuat pilihan produk keuangan.
- b. Produk Pembayaran
Produk pembayaran merupakan bagian dari *product holding* yang tujuannya merupakan alat dalam membayar suatu barang atau jasa. Indikator ini juga dapat mengeksplorasi apakah konsumen sadar akan produk keuangan yang tersedia secara nasional. Produk keuangan juga semakin berkembang

dengan adanya digitalisasi ekonomi seperti dalam meningkatkan inklusi keuangan yaitu dengan *financial technology*.

c. Produk Asuransi

Indikator ini digunakan untuk mengidentifikasi produk keuangan berupa asuransi yang dimiliki oleh responden. Kesadaran konsumen terhadap produk keuangan nasional yang tersedia. Seberapa banyak masyarakat yang sudah memiliki produk asuransi.

d. Pinjaman Kredit

Indikator ini digunakan untuk melihat seberapa banyak masyarakat yang telah menggunakan penyediaan uang atau tagihan. Pinjaman kredit merupakan kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran dengan jumlah bunga sebagai ketidakseimbangan.

e. Pemahaman Produk Keuangan

Selain memiliki produk keuangan, kesadaran akan penggunaan produk sesuai kebutuhan juga penting. Kesadaran ini akan mencegah kesalahan pemilihan dan membantu penyedia produk keuangan untuk mengetahui permintaan dari masyarakat.

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menurut OECD karena sesuai dengan keadaan objek yang akan diteliti yang berfokus terhadap lima indikator yaitu tabungan/investasi, produk pembayaran, produk asuransi, pinjaman kredit dan pemahaman keuangan.

2.1.2 Literasi Keuangan

2.1.2.1 Pengertian Literasi Keuangan

Literasi keuangan berperan penting dalam sektor keuangan terutama dalam mewujudkan keuangan yang inklusif dan memiliki dampak yang sangat besar pada perekonomian karena pada kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari kegiatan keuangan. Menurut Kusumaningtuti & Cecep (2018:8) “Literasi keuangan diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan manajemen”. Sedangkan *Organisation for Economic Co-operation and Development* atau OECD (2016:3) literasi keuangan diartikan sebagai “Kombinasi kesadaran, pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan untuk membuat keputusan keuangan dan mencapai kesejahteraan keuangan individu”.

Lusardi dan Mitchell (2013:2) mengemukakan “Literasi keuangan adalah kemampuan masyarakat untuk memproses informasi ekonomi dalam menentukan

keputusan tentang perencanaan keuangan, akumulasi kekayaan, pensiun, dan hutang”. Apabila seseorang memahami tentang pengetahuan keuangan, maka akan tertarik untuk memanfaatkan berbagai macam produk serta layanan keuangan yang tersedia secara lebih efektif. OJK (2015:1) juga menyimpulkan “Literasi keuangan mencakup suatu aktivitas atau proses meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*confidence*), keterampilan (*skill*) masyarakat luas sehingga mereka dapat mengelola manajemen keuangan dengan baik”.

Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat di atas bahwa literasi keuangan yaitu pengetahuan, pemahaman dan keterampilan individu mengenai keuangan terhadap produk serta layanan keuangan untuk mengambil keputusan yang tepat sehingga terhindar dari risiko ataupun masalah keuangan.

2.1.2.2 Kategori Literasi Keuangan

Dalam survei yang pertama pada tahun 2013 OJK melaksanakan Edukasi dalam rangka meningkatkan keuangan masyarakat dan mengelompokan tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia dibagi menjadi empat bagian, yakni:

- a. *Well literate* (21,84 %), yakni memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.
- b. *Sufficient literate* (75,69 %), memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.
- c. *Less literate* (2,06 %), hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.
- d. *Not literate* (0,41%), tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

2.1.2.3 Tujuan Literasi Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (2016:4) literasi keuangan memiliki tujuan jangka panjang bagi seluruh golongan masyarakat:

- a. Meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya *less literate* atau *not literate* menjadi *well literate*.
- b. Meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan
- c. Masyarakat luas dapat menentukan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan.

- d. Mampu memilih dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan; memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik.
- e. Terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas.
- f. Mendapatkan pemahaman mengenai manfaat dan risiko produk dan layanan jasa keuangan.

Literasi keuangan masyarakat meningkat maka akan memberikan manfaat yang besar bagi sektor jasa keuangan dengan demikian semakin banyak masyarakat yang akan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan.

2.1.2.4 Fungsi Literasi Keuangan

Literasi keuangan mempunyai fungsi sesuai dengan POJK (2016:12-13), fungsi dari ditingkatkannya literasi keuangan yaitu memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan dan melaksanakan suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan.
- b. Melakukan pemantauan serta evaluasi atas dilaksanakannya kegiatan peningkatan literasi keuangan yang sudah dilakukan para pelaku usaha jasa keuangan.
- c. Memberikan masukan kepada unit bisnis yang bertugas melakukan riset dan pengembangan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan konsumen dan sesuai kemampuan yang dimiliki konsumen.

2.1.2.5 Indikator Literasi Keuangan

Indikator yang digunakan sebagai instrumen ini berdasarkan survei literasi keuangan yang dapat digunakan dengan latar belakang yang sangat berbeda di berbagai negara dengan melibatkan 30 negara dan indikator tersebut dikembangkan OECD pada survei kedua tahun 2016. OECD *International Network on Financial Education* (dalam Kusumaningtuti & Cecep, 2018:74)

- a. Pengetahuan keuangan (*financial knowledge*)
Merupakan komponen penting dari literasi keuangan seorang individu dalam rangka membantu mereka dalam hal membandingkan produk dan jasa lembaga keuangan agar mereka bisa membuat keputusan keuangan yang tepat dan terinformasi dengan baik.
- b. Perilaku keuangan (*financial behaviour*)
Selain pengetahuan keuangan yang penting dalam hal literasi keuangan, akan tetapi perilaku konsumenlah yang akhirnya membentuk keuangan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Karena sebagian besar masyarakat belum menunjukkan perilaku yang dibutuhkan untuk lebih tahan terhadap goncangan (*financial resilient*), dalam bentuk perilaku

menabung secara aktif, berikir ulang sebelum membeli sesuatu, membayar tagihan tepat waktu, memperhatikan secara seksama permasalahan keuangan dan mempunyai tujuan keuangan jangka panjang.

c. Sikap keuangan (*financial attitude*)

Indikator ini berfokus pada pertanyaan terkait dengan bagaimana responden dalam sikap memprioritaskan keinginan jangka pendek daripada keamanan jangka panjang atau membuat rencana keuangan jangka panjang.

2.1.3 Financial Self Efficacy

2.1.3.1 Pengertian Financial Self Efficacy

Financial Self-efficacy berasal dari *Self-efficacy* atau efikasi diri yang merupakan faktor internal individu atau kondisi psikologis. *Self-efficacy* pertama kali dikemukakan oleh Albert Bandura (1977:31) menunjukkan bahwa “*Self-efficacy* konstruksi psikologis yang didasarkan pada evaluasi kemampuan seseorang adalah sebuah keyakinan terkait kemampuan pribadi untuk mengatur dan melaksanakan suatu tindakan menunjukkan keahlian tertentu”. Sedangkan menurut Woolfolk (2007:332) “*Self efficacy* juga merupakan penilaian seseorang terhadap diri sendiri atau tingkat keyakinan pada kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas dalam mencapai tujuan atau hasil tertentu”. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *self-efficacy* adalah kemampuan dan keyakinan individu dalam mengatur dan melaksanakan suatu tindakan sesuai dengan tujuan tertentu.

Self Efficacy dapat dikaitkan dengan konteks keuangan dan bisa disebut *financial self efficacy* atau efikasi diri keuangan. *financial self efficacy* merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan keuangan. Efikasi diri merupakan suatu sikap yang melekat pada diri seseorang, tentunya setiap individu memiliki perbedaan. Peter Garlans Sina (2013:183) menjadi salah satu pemicunya “individu mengelola keuangan dengan benar dan berusaha untuk meningkatkan metode pengelolaan keuangan yang lebih baik sehingga meningkatkan efektivitas keuangan dan dapat mengalami kepuasan finansial”. Danes dan Haberman (2007:55) menyatakan bahwa “Efikasi keuangan memiliki pengaruh pada keputusan yang diambil dalam pengelolaan keuangan para remaja, efikasi keuangan juga merupakan salah satu kunci keberhasilan keuangan karena akan meningkatkan pengelolaan uang yang benar”.

Brandon dan Smith (2009:16) *financial self efficacy* merupakan “keyakinan positif pada kemampuan individu untuk mengelola keuangan dengan sukses dan memiliki keyakinan pada kemampuan individunya”. Sedangkan menurut Forbes dan Kara (2010:435-436) *financial self efficacy* adalah “kepercayaan atau keyakinan seseorang atas kemampuannya dalam mencapai tujuan keuangan dan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya keterampilan keuangan, kepribadian, sosial maupun faktor lainnya”.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *financial self efficacy* merupakan keyakinan dan kemampuan seseorang yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keterampilan keuangan, kepribadian, sosial maupun faktor lainnya dalam mengelola keuangan untuk mencapai tujuan keuangan dan kepuasan finansial.

2.1.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Financial Self Efficacy*

Financial self efficacy yang berkaitan dengan teori *self efficacy* terdapat faktor yang mempengaruhi perkembangannya. Menurut Ormrod (2008 23-27) faktor yang mempengaruhi perkembangan *self-efficacy* sebagai berikut:

- a. Keberhasilan serta kegagalan pendidikan sebelumnya
Ketika seorang individu menjumpai kegagalan ataupun kemunduran kecil dalam proses menggapai kesuksesan, mereka belajar kalau mereka bisa mencapai kesuksesan bila mereka berupaya lebih keras lagi. Mereka pula menguasai bahwa kegagalan bisa dijadikan pengalaman untuk meningkatkan efikasi diri yang kokoh.
- b. Pesan dari orang lain
Efikasi diri seseorang dapat bertambah lewat stimulus berbentuk alasan-alasan yang diberikan oleh orang lain kepada seseorang kalau mereka dapat sukses di masa depan. Apalagi umpan balik negatif bisa meningkatkan performa apabila umpan balik itu mengkomunikasikan kepercayaan bahwa perbaikan itu sangat bisa jadi
- c. Keberhasilan serta kegagalan orang lain
Seseorang kerap memikirkan kesuksesan serta kegagalan orang lain ketika memperhitungkan kesempatan sukses mereka sendiri. Optimisme mengenai keahlian seseorang bisa dibangun lewat pengamatan kesuksesan dan kegagalan orang lain sehingga efikasi diri mereka dapat bertambah.
- d. Keberhasilan serta kegagalan dalam kelompok yang lebih besar
Efikasi diri yang lebih besar secara kolektif bergantung tidak hanya pada anggapan seorang serta orang lain, melainkan pula pada anggapan mereka tentang bagaimana mereka bisa berkolaborasi secara efisien serta mengkoordinasikan kedudukan serta tanggungjawab mereka.

2.1.3.3 Indikator *Financial Self Efficacy*

Dimensi *financial self efficacy* yang berpengaruh terhadap perilaku keuangan menurut Bandura (1997:3) dapat dikaitkan dengan dimensi “*self efficacy* pada umumnya yaitu: level (*magnitude*), generalisasi *generality* dan *strength*”.

Sedangkan menurut Lown (2011:63) dalam penelitiannya mengembangkan skala dalam mengukur *financial self-efficacy* yang akan digunakan sebagai indikator dalam mengukur kemampuan *financial self-efficacy* sebagai berikut:

- a. Kemampuan dalam melakukan perencanaan pengeluaran keuangan.
Kemampuan membuat perencanaan keuangan yang baik, membuat keputusan dengan adanya pertimbangan dan menggunakan keuangan dengan *balance* atau bijak antara pemasukan dan pengeluaran.
- b. Kemampuan dalam mencapai tujuan keuangan.
Dalam membuat tujuan keuangan dapat dicapai dengan membuat skala prioritas, mengelola keuangan sesuai dengan rencana keuangan yang telah dibuat dan mampu mengelola keuangan secara individu tanpa membandingkannya dengan orang lain.
- c. Kemampuan pengambilan keputusan saat dihadapkan kejadian tak terduga.
Kemampuan ini diantaranya memiliki simpanan uang darurat, mampu menolak ajakan dan dapat mengorganisasi kegiatan berbelanja sesuai kebutuhan.
- d. Kemampuan dalam menghadapi tantangan keuangan.
Mampu menghadapi keadaan sulit dalam kondisi keuangan seperti memiliki perencanaan membuat solusi dan tidak mudah putus asa.
- e. Keyakinan dalam kemampuan mengelola keuangan.
Memiliki kepercayaan diri yang baik dalam mengelola keuangan maupun dalam mengambil keputusan.
- f. Keyakinan terhadap kondisi keuangan di masa depan.
Memiliki keyakinan kuat dalam mengelola keuangan untuk merubah kondisi keuangan di masa depan dan memiliki kepercayaan dalam mengelola keuangan guna menghindari masalah keuangan dimasa yang akan datang.

Indikator yang dikembangkan oleh Lown dalam penelitiannya tersebut digunakan penulis karena lebih spesifik dalam mengukur *financial self-efficacy* dan setiap indikatornya sesuai dengan keadaan yang ingin diteliti dan akan dikembangkan lebih luas melalui pernyataan dalam instrumen.

2.1.4 *Financial Technology*

2.1.4.1 Pengertian *Financial Technology*

Di Indonesia telah banyak industri startup yang memakai jasa *Financial technology* yang semakin berkembang dan terus berinovasi. Sedangkan itu *FinTech* dinilai lebih efisien serta efektif dengan memakai teknologi, aplikasi serta juga informasi. Menurut *National Digital Research Centre* (NDRC), istilah teknologi finansial merupakan sebutan untuk inovasi di bidang jasa finansial yang berasal dari dua kata yakni *financial* dan *technology*. Istilah *financial technology* mengacu pada perkembangan teknologi modern dalam bidang perbankan selain itu NDRC menyebutkan bahwa *FinTech* adalah sebuah istilah untuk inovasi dalam jasa keuangan dan teknologi sebagai kuncinya. Sedangkan menurut Chrismastianto (2017:134) “*FinTech* merupakan salah satu dari perkembangan teknologi yang menjadi bahan kajian terkini di Indonesia dalam lembaga perbankan”. Ion & Alexandra (2016:380) mengemukakan “*Financial technology* merupakan sektor layanan dalam industri keuangan yang memberikan inovasi layanan dan aktivitas keuangan masyarakat”.

Menurut Bank Indonesia sendiri *financial technology* merupakan hasil dari penggabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dan konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam melakukan transaksi pembayaran harus melakukan pertemuan atau tatap muka dan membawa sejumlah uang kas, namun kini dengan adanya *FinTech* dapat melakukan kegiatan transaksi atau pembayaran jarak jauh dengan mudah tanpa harus bertatap muka dan dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.

Berdasarkan *International Organization of Securities Commissions* (IOSCO) *Research Report on Financial Technologies* (2017:2) “*Financial Technology* digunakan untuk menggambarkan berbagai model bisnis inovatif dan teknologi baru yang berpotensi mengubah atau mengganggu industri jasa keuangan”. Sedangkan menurut Asosiasi *Financial Technology* Indonesia (AFTECH, 2020:8) diartikan sebagai “inovasi layanan keuangan berbasis teknologi yang memberikan nilai tambah dalam jasa keuangan.”

FinTech memberikan kemudahan bagi konsumen dalam menggunakan/memanfaatkan berbagai layanan jasa keuangan secara digital, seperti: pembayaran, pinjaman, investasi, dan asuransi. Dengan menggunakan *FinTech*, konsumen dapat melakukan transaksi pembayaran tanpa harus bertatap muka, memperoleh pinjaman tanpa harus mengunjungi kantor cabang bank, memilih, dan mengetahui produk keuangan yang paling sesuai dengan kebutuhan kita, berinvestasi secara mudah serta memperoleh nasihat perencanaan keuangan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *financial technology* merupakan inovasi layanan dalam industri keuangan yang berbasis digital disertai dengan perkembangan teknologi yang memberikan layanan keuangan secara efektif, efisien, ekonomis dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Munculnya *FinTech* karena adanya perubahan gaya hidup masyarakat saat ini yang dipimpin oleh pengguna teknologi informasi, kebutuhan hidup yang serba bisa dan dapat meningkatkan intensitas penggunaan terhadap layanan keuangan.

2.1.4.2 Keunggulan dan Kelemahan *Financial Technology*

Financial technology dalam implementasinya memiliki keunggulan dan kelemahan dan hal tersebut menjadi perhatian untuk perbaikan yang lebih baik. Otoritas Jasa Keuangan (2016:1-30) menyebutkan kelebihan dan kelemahan dari *FinTech*. Kelebihan *FinTech* sebagai berikut:

- a. Melayani masyarakat Indonesia yang belum dapat dilayani oleh industri keuangan tradisional dikarenakan ketatnya peraturan perbankan dan adanya keterbatasan industri perbankan tradisional dalam melayani masyarakat di daerah tertentu.
- b. Menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional dimana masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan.

Selain memiliki kelebihan *FinTech* juga memiliki kelemahan adalah sebagai berikut:

- a. *FinTech* merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang besar, jika dibandingkan dengan bank.
- b. Sebagaimana perusahaan *FinTech* belum memiliki kantor fisik dan kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait sistem keamanan dan integritas produknya.

2.1.4.3 Perkembangan *Financial Technology*

Dalam perkembangannya *financial technology* terbagi ke dalam beberapa era. Amer, et al. dalam (Nicoletti, 2017:17) menyatakan bahwa penting untuk kita membedakan tiga era utama dari evolusi *FinTech*.

- a. *FinTech* 1.0 berlangsung antara tahun 1866-1967, era pengembangan infrastruktur dan komputerisasi sehingga terbentuk jaringan keuangan global. Pada era ini sebenarnya industri layanan finansial masih cenderung tradisional tanpa banyak terkait dengan teknologi yang disebut dengan era *FinTech* 1.0. Namun sudah mulai berkembang seiring berjalan waktu.
- b. *FinTech* 2.0 berlangsung antara tahun 1967-2008, era penggunaan internet dan digitalisasi di sektor keuangan. Sektor keuangan mulai banyak yang telah terdigitalisasi yang disebabkan oleh perkembangan teknologi komunikasi dan transaksi yang cukup pesat pada periode ini.
- c. *FinTech* 3.0 dan *FinTech* 3.5 berlangsung dari tahun 2008 sampai sekarang. *FinTech* 3.0 merupakan era penggunaan telepon maupun smartpone di sektor keuangan. Periode ini juga ditandai dengan banyaknya berkembang strat-up dan perusahaan teknologi yang mulai menawarkan produk dan layanan finansial langsung kepada bisnis dan publik, termasuk juga bank. *FinTech* 3.5 merupakan era kemunculan wujud bisnis teknologi keuangan sebagai pendatang baru yang memanfaatkan peluang dari inovasi proses teknologi, produk, dan model bisnis serta perubahan perilaku masyarakat. Perusahaan *startup* dan perusahaan teknologi yang mapan telah mampu memberikan produk dan layanan keuangan langsung kepada bisnis dan konsumen. Pada era ini, sektor keuangan dapat diakses melalui *mobile devices*.

2.1.4.4 Tantangan dan Risiko *Financial Technology*

Financial technology merupakan layanan keuangan yang terus mengalami perkembangan berdasarkan kemajuan teknologi dan informasi. Perkembangan *FinTech* juga menghasilkan berbagai inovasi keuangan, maka dari itu sangat penting untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap *FinTech* sehingga dapat mengatasi tantangan dan risikonya. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016:viii), tantangan yang dihadapi industri *FinTech* adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan dalam mendukung pengembangan *FinTech*. Hal ini terkait dengan bagaimana mengadopsi peraturan terkait tanda tangan (*digital signature*) dan penggunaan dokumen secara digital sehingga dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh industri *FinTech*.
- b. Koordinasi antar Lembaga dan Kementerian Terkait untuk mengoptimalkan potensi *FinTech* dengan lingkungan bisnis (*business environment*) yang kompleks, maka perlu juga dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait.

2.1.4.5 Klasifikasi *Financial Technology*

Klasifikasi *FinTech* berdasarkan laporan *Annual Member Survey 2019/2020* oleh Asosiasi *FinTech* Indonesia (AFTECH, 2019:8-9) mencakup empat model bisnis utama:

- a. Pembayaran Digital
Menurut PBI No. 18/40/PBI/2016 melingkupi *e-Money*, dompet digital (*e-Wallet*), pengiriman uang dalam bentuk valuta asing (*remittance*), payment gateway, solusi melalui point of sales (POS), jaringan agen pembayaran (*payment agent network*), pembayaran tagihan (*bill payment*), dan *payment issuer support*
- b. Pinjaman Online
Menurut POJK No. 77/POJK.91/2016 mencakup pinjaman *off-balance sheet* kepada konsumen dan pelaku bisnis serta pinjaman *on-balance sheet* kepada konsumen
- c. Tekfin dalam kategori Inovasi Keuangan Digital (IKD).
Menurut POJK No. 13/POJK.02/2018, IKD diartikan sebagai aktivitas pemutakhiran proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital. Ruang lingkup IKD meliputi:
 - 1) Penyelesaian transaksi (*transaction settlement*);
 - 2) Pengumpulan modal, termasuk Layanan Urun Dana, pertukaran virtual (*virtual exchange*), kontrak pintar (*smart contract*), dan *alternative due diligence*;
 - 3) Manajemen investasi, termasuk *advanced algorithm*, *cloud computing*, *capabilities sharing*, *open source information technology*, *automated advice and management*, *social trading*, dan *retail algorithmic trading*;
 - 4) Pengumpulan dan distribusi dana, termasuk pinjaman P2P, *alternative adjudication*, teknologi virtual, mobile 3.0, dan *third-party application programming interface*;
 - 5) Asuransi, termasuk *sharing economy*, *autonomous vehicle*, distribusi digital serta sekuritisasi dan *hedge fund*;
 - 6) *Market support*, termasuk *artificial intelligence/machine learning*, *machine readable news*, sentimen sosial, big data, platform informasi pasar, dan pengumpulan dan analisis data otomatis;
 - 7) Dukungan keuangan digital lainnya, termasuk urun dana sosial/ekonomi, pembiayaan digital syariah, *e-Wakaf*, *e-Zakat*, *robo-advice*, dan penilaian kredit; dan/atau
 - 8) Aktivitas layanan keuangan lainnya, termasuk perdagangan *invoice*, *voucher*, *token*, dan *blockchain*.
- d. Layanan Urun Dana
Menurut POJK No. 37/POJK.04/2018 diartikan sebagai penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka.

2.1.4.6 Indikator *Financial Technology*

Indikator *FinTech* ini menggunakan teori *Technology Acceptance Model* (TAM) adalah salah satu model yang dapat digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya suatu sistem atau sistem informasi yang pertama kali dikembangkan oleh Davis pada tahun 1989 yang merupakan model populer untuk memprediksi kegunaan dan penerimaan sistem informasi dan teknologi *by individual users*. Dalam TAM terdapat dua faktor yang relevan dalam perilaku penggunaan terhadap teknologi yang dikembangkan oleh Chuang, *et.al* (2016:1-15):

- a. Persepsi Kegunaan (*Perceived usefulness*)
Persepsi Kegunaan (*Perceived Usefulness*) untuk mengukur niat berperilaku dalam menggunakan suatu sistem informasi meliputi dimensi yang berkaitan dengan efisiensi, efektivitas kegunaan dalam meningkatkan kinerja dan kegunaan dalam menjawab kebutuhan informasi
- b. Persepsi Kemudahan Penggunaan (*Perceived Ease of Use*)
Persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha. Dimensi yang berkaitan dengan indikator ini yaitu fleksibilitas, kemudahan untuk berinteraksi, kemudahan untuk digunakan dan kemudahan untuk dipelajari

Teori TAM yang dikembangkan oleh Chuang, *et.al* tersebut berfokus pada persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan *FinTech* yang akan dijadikan indikator dalam mengukur perilaku penggunaan *FinTech* mahasiswa.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dapat membantu penulis dalam melakukan kajian literatur dan merupakan merupakan upaya pencarian dalam melakukan perbandingan antara penelitian yang terdahulu dan penelitian yang akan dilaksanakan, berikut beberapa penelitian yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang akan dilaksanakan:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian yang Relevan

No.	Sumber	Judul	Hasil
1	Muhammad Saleh, Fatima Sari dan Syamsulriyadi Jurnal Nasional Vol. 2 Nomor 2 2020	Pengaruh Literasi Keuangan dan Kualitas Pembelajaran Keuangan Terhadap Penggunaan <i>FinTech</i> Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi Universitas Fajar	Literasi keuangan dan kualitas pembelajaran keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan <i>FinTech</i> mahasiswa.
2	Maya A. N., Florentina K. T., Ernie H., & Vina M. O. Jurnal Nasional Vol. 12 Nomor 1 2020	Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Inklusi Keuangan dengan Menggunakan <i>Social Capital</i> Sebagai Variabel Mediator	<i>Financial literacy</i> tidak berpengaruh dengan <i>financial inclusion</i> sedangkan <i>financial literacy</i> berpengaruh terhadap <i>social capital</i> serta <i>social capital</i> dapat membantu <i>financial literacy</i> dalam menciptakan inklusi keuangan yang lebih baik pada UMKM di Kota Tangerang Selatan
3	Cut Misni M. & Karina O. J. Vol. 27 Nomor 1 2020	Optimalisasi <i>Financial</i> Teknologi (<i>FinTech</i>) Terhadap Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Usaha Menengah Purwokerto	Layanan keuangan berbasis <i>FinTech</i> memiliki pengaruh positif terhadap literasi keuangan dan inklusi keuangan usaha menengah di Purwokerto.
4	Luh R. E. P. & Astrie K. Jurnal Nasional Vol. 4 Nomor 2 2020	Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap <i>Financial Self-efficacy</i> Pada Usia Produktif di Kabupaten Buleleng, Bali	Hasil penelitian ini menemukan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>financial self-efficacy</i> .

5	INP Kusuma Jurnal Nasional Vol. 4 Nomor 5 2020	Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Inklusi Keuangan Melalui <i>Financial Technology</i> Pada UMKM di Bandar Lampung	Literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan melalui <i>financial teknologi</i> pada UMKM di Bandar Lampung.
6	Siti Ruhana Dara & Mariah Jurnal Nasional Vol. 2 Nomor 3 2020	Peran <i>FinTech</i> Dalam Upaya Untuk Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Masyarakat di Jakarta	Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa persepsi kemafaatan berpengaruh positif terhadap literasi keuangan, sedangkan persepsi kemudahan penggunaan tidak berpengaruh terhadap literasi keuangan
7	Richy W. W., Hartini & Farah M. L. Jurnal Internasional Vol. 100 ICOI 2019	<i>Financial Inclusion and Financial Self-Efficacy In Indonesia</i>	Temuan ini juga mendukung strategi yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia salah satu pilar edukasi masyarakat tentang produk keuangan merupakan langkah yang tepat. Secara khusus, kepercayaan diri tentang mengelola keuangan pribadi dan memiliki tujuan keuangan dapat berfungsi untuk mendorong orang untuk mempertimbangkan menggunakan layanan keuangan formal.
8	Fitri Rusdianasari Jurnal Nasional Vol. 11 Nomor 2 2018	Peran Inklusi Keuangan melalui Integrasi <i>FinTech</i> dalam Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia	Instrumen <i>FinTech</i> yang mendorong inklusi keuangan seperti jumlah ATM dan <i>e-money</i> tidak berdampak signifikan terhadap kinerja stabilitas sistem keuangan.

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan Hasil Penelitian yang Relevan

Persamaan	
Penelitian sebelumnya	Penelitian yang akan dilakukan
1. Dari ketujuh penelitian di atas terdapat beberapa variabel yang sama yaitu literasi keuangan sebagai variabel X dan inklusi keuangan variabel Y dan juga <i>financial technology</i> 2. Metode penelitian yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei	1. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan variabel yang sama seperti literasi keuangan dan variabel inklusi keuangan sebagai variabel Y 2. Metode yang digunakan dengan pendekatan kuantitatif dengan metode survei
Perbedaan	
Penelitian sebelumnya	Penelitian yang akan dilakukan
1. Terdapat beberapa variabel yang berbeda-beda dengan penelitian sebelumnya seperti menggunakan variabel <i>social capital</i> sebagai mediator di penelitian sebelumnya 2. Subyek penelitian yang berbeda dan ada beberapa yang menggunakan teknik pengolahan data yang berbeda.	1. Terdapat 1 variabel X yang berbeda yaitu <i>financial self-efficacy</i> dan <i>financial technology</i> sebagai <i>intervening</i> 2. Berdasarkan penelitian sebelumnya rata-rata subyek penelitian yang digunakan berbeda dan masih sedikit yang sasarannya terhadap mahasiswa.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir menurut Sugiyono (2017:60) mengemukakan bahwa “Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting” Kerangka pemikiran ini menjelaskan hubungan antar variabel yang ditunjukkan berdasarkan hasil penelitian dan kajian teori. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian yaitu teori *behavioral finance* yang mulai dikenal pada tahun 1950-an dan mulai banyak dikembangkan oleh para ahli termasuk Fuller (2000) menjelaskan tiga poin penting dalam *behavioural finance* yaitu penggabungan antara ekonomi klasik dan keuangan dengan psikologi, anomali-

anomali keuangan dan menjelaskan bagaimana investor secara sistematis membuat judgement yang salah atau “mental mistakes”

Teori ini memasukan unsur psikologi ke dalam penelitian keuangan. Teori tersebut sudah banyak dikembangkan oleh para peneliti seiring adanya penolakan terhadap teori *traditional finance* untuk menjelaskan *anomaly* dalam fenomena pasar uang dan pasar modal, maka para peneliti keuangan mulai mengkaitkan fenomena yang ada dengan aspek perilaku (*behavioral finance*). *Behavioral finance* merupakan interdisiplin dari tiga kajian (*integrate behavioral finance*) yaitu psikologi, sosiologi dan keuangan.

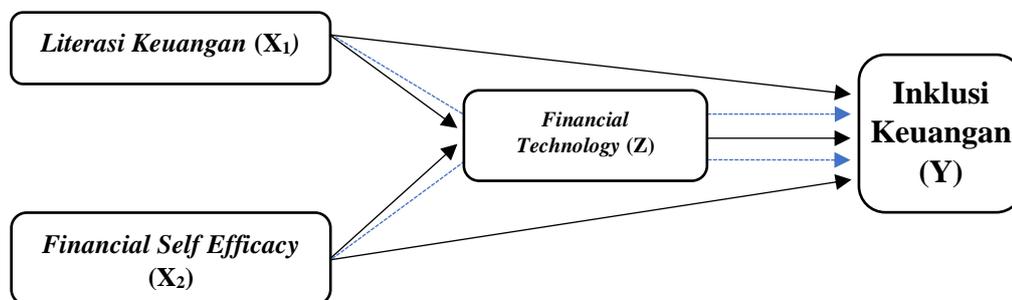
Perilaku manusia yang umumnya reaktif, bukan proaktif sehingga sulit untuk membuat prediksi atas dasar aturan yang sempit. Perilaku keuangan relatif mudah untuk menjelaskan mengapa individu telah membuat keputusan, tetapi mengalami kesulitan dalam mengukur apa efek dari keputusan tersebut terhadap individu. Hal tersebut berhubungan dengan kemampuan *financial sefl efficacy* dimana keadaan psikologi atau keyakinan individu dapat mempengaruhi keputusan.

Behavioural finance juga suatu percobaan untuk menjelaskan apa penyebab beberapa anomali-anomali keuangan yang sudah terlihat dan dibukukan dalam literasi keuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa *behavioural finance* atau perilaku keuangan juga dipengaruhi oleh literasi keuangan individu. Literasi keuangan merupakan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan keyakinan (*confidence*), yang mempengaruhi sikap (*attitude*) dan perilaku (*behavior*) untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan literasi keuangan dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan serta dipengaruhi oleh *financial self-efficacy* yang akan mempengaruhi kualitas keputusan untuk hasil yang diharapkan.

Behavioural finance merupakan perilaku keuangan yang dipengaruhi oleh literasi keuangan apabila seseorang memahami tentang pengetahuan keuangan, maka akan tertarik untuk memanfaatkan berbagai macam produk serta layanan keuangan yang tersedia secara lebih efektif seperti yang sudah berkembang pada

saat ini dengan adanya layanan *FinTech* yang menjembatani keuangan inklusif dan selaras dengan kemampuan literasi keuangan maupun *financial self-efficacy* individu.

Kesimpulannya inklusi keuangan dipengaruhi oleh perilaku dan sikap seperti kemampuan literasi keuangan, *financial self-efficacy* dan penggunaan *FinTech* sebagai tindakan dari perilaku tersebut yang kemudian akan berpengaruh terhadap inklusi keuangan. Variabel-variabel tersebut memiliki keterkaitan antara satu sama lain sebagaimana yang dijelaskan dalam teori *behavioural finance*. Kerangka konseptual mengenai hubungan variabel Literasi Keuangan (X_1) dan *Financial Self Efficacy* (X_2) terhadap Inklusi Keuangan (Y) melalui *Financial Technology* (Z) digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teori dan permasalahan yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik hipotesis penelitian yang merupakan jawaban sementara dari masalah penelitian yang telah dirumuskan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh literasi keuangan terhadap *financial technology* pada mahasiswa FKIP angkatan 2018
2. Terdapat pengaruh *financial self efficacy* terhadap *financial technology* pada mahasiswa FKIP angkatan 2018
3. Terdapat pengaruh literasi keuangan terhadap inklusi keuangan pada mahasiswa FKIP angkatan 2018
4. Terdapat pengaruh *financial self efficacy* terhadap inklusi keuangan pada mahasiswa FKIP angkatan 2018

5. Terdapat pengaruh *financial technology* terhadap inklusi keuangan pada mahasiswa FKIP angkatan 2018
6. Terdapat pengaruh literasi keuangan terhadap inklusi keuangan melalui *financial technology* pada mahasiswa FKIP angkatan 2018
7. Terdapat pengaruh *financial self efficacy* terhadap inklusi keuangan melalui *financial technology* pada mahasiswa FKIP angkatan 2018